

DAFTAR BACAAN

1. Buku

- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Hadjon, Philipus M. et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1993
- , *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994.
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawaliipers (RajaGrafindo Persada), 1995
- Ilyas, Wirawan B., *Hukum Pajak*, edisi 5, Salemba Empat, Jakarta, 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Surabaya, 2005.
- Pasha, Mustafa Kemal, *Pancasila dan Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003.
- Pengkajian Hukum, Tim, *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sidarta, B. Arief et al., *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, 1987
- , *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2004

- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Utrecht, Ernst, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1988
- Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007

2. Makalah dan Jurnal

- Aris Dewanto, “*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos di Kota Jakarta Pusat*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011
- Chandra Dewi P, “*Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak*”, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2005
- Dewi Kurniawati, “*Sistem Self Assessment Sebagai Sistem Pemungutan Pajak*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003
- Friansyah Murandik et al., “*Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah*”, Jurnal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brwajaya, Malang, 2014
- Judi Budiman, “*Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*”, Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012
- Masta Sembiring, “*Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011
- Ni Gusti Ayu H.S.L, “*Eksistensi Klausul Pengaman dalam Keputusan Gubernur Bali yang Berkarakter Keputusan Tata Usaha Negara*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2010

Putriana Sudirman, *“Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”*, Skripsi, Fakultas ekonomi Universitas Widyatama, Bandung, 2010

So Woong Kim, *“Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

3. Majalah

Evans Emanuel S, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000*, Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

Philipus M. Hadjon, *“Tentang Wewenang”*, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September – Desember, 1997

Redaksi SPTaxNewsletter, *“Pemajakan Atas Rumah Kos-kosan”*, Edisi September I, 2013

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 28 tahun Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4627)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 32/E)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 tahun 2010 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 67)

5. Internet

Abdul Hakim, "Pengesahan RAPBD Surabaya Diwarnai Protes Dewan", <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/121215/pengesahan-rapbd-surabaya-diwarnai-protos-dewan> , diakses pada tanggal 8 September 2014

Surya Aji Bramastra, Rumah Indekos Menjamur, Pemkot Surabaya Cari Payung Hukum, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/06/14/rumah-indekos-menjamur-pemkot-surabaya-cari-payung-hukum>, diakses pada tanggal 8 September 2014

Harry Djatmiko, “*Tindak Pidana Perpajakan*”, *slide share* materi perkuliahan, <http://harrydjatmiko.dosen.narotama.ac.id/files/2011/06/Pidana-Pajak.ppt>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2014

Ibnu Wijaya, “Menenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance”, 12 Agustus 2014, <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>, diakses pada tanggal 24 November 2014

Rizal, “Makalah perpajakan”, <https://sites.google.com/site/materikuliahrizal/makalah-perpajakan>, 15 Desember 2013, diakses pada tanggal 22 November 2014

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, <http://www.surabaya.go.id/dinamis/?id=36>, diakses pada tanggal 27 Desember 2014

Konseling, <http://id.wikipedia.org/wiki/Konseling>, diakses pada tanggal 29 Desember 2014

